

STRATEGI *HEDGING* EKONOMI INDONESIA: MEMPERKUAT POSISI TAWAR DALAM KOMPETISI INVESTASI AMERIKA SERIKAT-TIONGKOK

Garindra Ganeswara¹, Made Panji Teguh Santoso²

Universitas Singaperbangsa Karawang
2210631260032@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi *economic hedging* Indonesia dalam merespons kompetisi investasi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di kawasan ASEAN pada periode 2020–2023, serta mengevaluasi dampaknya terhadap posisi tawar dan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui studi literatur. Kerangka analisis yang digunakan mengintegrasikan teori *hedging* (Kuik, 2008; 2016) dan pendekatan *economic statecraft* (Baldwin, 2020), disandingkan dengan analisis komparatif atas tren *Foreign Direct Investment* (FDI) antara Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Temuan menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan tiga langkah utama *hedging* ekonomi: memperdalam keterlibatan investasi berimbang dengan AS dan Tiongkok, memperkuat kerangka regulasi domestik untuk mitigasi risiko ketergantungan, serta berperan aktif mengarahkan agenda ekonomi regional ASEAN. Strategi ini berhasil meningkatkan ketahanan dan otonomi ekonomi (*power of autonomy*), meski dalam memengaruhi dinamika kawasan (*power over others*), efektivitasnya masih berada di bawah Singapura dan Vietnam. Simpulan, *Economic hedging* terbukti efektif sebagai mekanisme mitigasi risiko geopolitik sekaligus memperkuat otonomi ekonomi Indonesia. Namun, untuk memaksimalkan daya tawar dan kepemimpinan ekonomi di kawasan, Indonesia perlu meningkatkan efisiensi birokrasi, akselerasi eksekusi kebijakan, dan orientasi investasi pada sektor bernilai tambah tinggi.

Kata kunci: Amerika Serikat, ASEAN, *Economic Statecraft*, FDI, *Hedging Ekonomi*, Indonesia, Tiongkok.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Indonesia's economic hedging strategy in response to investment competition between the United States (US) and China in the ASEAN region during the 2020–2023 period, and to evaluate its impact on the country's bargaining position and economic resilience. The research employs a qualitative approach with a case study design based on a literature review. The analytical framework integrates hedging theory (Kuik, 2008; 2016) and the economic statecraft approach (Baldwin, 2020), alongside a comparative analysis of Foreign Direct Investment (FDI) trends among Indonesia, Singapore, and Vietnam. The

findings indicate that Indonesia has implemented three key economic hedging measures: deepening balanced investment engagement with both the US and China, strengthening domestic regulatory frameworks to mitigate dependency risks, and playing an active role in steering ASEAN's regional economic agenda. This strategy has successfully enhanced economic resilience and autonomy ("power of autonomy"), although its effectiveness in influencing regional dynamics ("power over others") remains lower than that of Singapore and Vietnam. In conclusion, economic hedging has proven effective as a mechanism for mitigating geopolitical risks while strengthening Indonesia's economic autonomy. However, to maximize its bargaining power and economic leadership in the region, Indonesia needs to improve bureaucratic efficiency, accelerate policy execution, and orient investment toward high-value-added sectors.

Keywords: *ASEAN, China, Economic Hedging, Economic Statecraft, FDI, Indonesia, United States.*

PENDAHULUAN

ASEAN sebagai arena kompetisi investasi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok karena kawasan ini memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi yang besar. Populasi ASEAN yang mencapai hampir 700 juta jiwa dengan kelas menengah yang terus berkembang menjadikan kawasan ini pasar yang menarik untuk berbagai sektor bisnis (Arief, 2025). Kompetisi investasi AS–Tiongkok di ASEAN semakin ketat, terutama setelah Tiongkok berhasil menyalip AS dalam perdagangan dengan nilai hampir US\$ 982 miliar pada 2024, sementara AS hanya sekitar US\$ 476 miliar. Dalam investasi langsung asing, meski nilai pada 2024 seimbang, tren jangka panjang menunjukkan dominasi Tiongkok. Kebijakan tarif timbal balik dari AS justru menimbulkan ketidakpastian bagi negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, sehingga memberi ruang bagi Tiongkok untuk tampil sebagai mitra yang lebih stabil. Bagi ASEAN, kondisi ini menjadi peluang untuk memperoleh manfaat dari kedua

kekuatan besar, namun juga menjadi tantangan karena harus menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam ketergantungan berlebihan pada salah satunya (Hunt, 2025).

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN dengan posisi strategis yang menempatkan sebagai aktor penting dalam dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Secara geografis, Indonesia berada di persimpangan dua benua, yaitu Asia dan Australia serta dua samudera besar, Hindia dan Pasifik, sehingga menjadikan jalur utama dalam konektivitas kawasan sekaligus salah satu *epicentrum global* (Sugiharto et al., 2025). Selain itu, kondisi geologis yang berada di kawasan cincin api dan dilalui oleh garis khatulistiwa memberikan Indonesia kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk potensi energi dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dalam konteks perdagangan internasional, sekitar 40 persen jalur perdagangan laut dunia melintasi perairan Indonesia, memperkuat perannya sebagai penghubung vital

antara kawasan Indo-Pasifik (Sonny, 2020). Kombinasi letak geografis, kekayaan sumber daya alam, serta kekuatan sosial-budaya menjadikan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pasar potensial dan pemasok bahan baku global. Di tengah rivalitas kekuatan besar, Indonesia menerapkan strategi *hedging* untuk menjaga kemandirian dan stabilitas nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoeкономи global.

Konsep *hedging* dalam hubungan internasional dipahami sebagai strategi adaptif negara-negara menengah dan kecil untuk menavigasi ketidakpastian sistemik serta menghindari keterikatan pada salah satu kekuatan besar. Ariandana & Abrar (2017) menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi ini dalam merespons klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan menyeimbangkan kepentingan keamanan dan diplomasi, sedangkan Nedić (2022) menegaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara secara umum memanfaatkan *hedging* guna mempertahankan stabilitas domestik di tengah rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok. Di sisi lain, literatur mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN, seperti yang dibahas oleh Beeson (2018) dan Ye (2020), lebih menyoroti FDI sebagai instrumen geo-ekonomi Tiongkok melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kalkulasi politik-keamanan, sehingga kurang melihat perannya dalam strategi *hedging* negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada *hedging* dalam aspek keamanan, sedangkan penelitian ini menekankan *hedging* ekonomi melalui

persaingan FDI. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada integrasi teori hubungan internasional dan ekonomi politik internasional dengan menjadikan kompetisi investasi AS–Tiongkok sebagai variabel utama dalam menganalisis strategi *hedging* Indonesia. Penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi empiris tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan rivalitas investasi dua kekuatan besar untuk memperkuat daya tawar, memperoleh transfer teknologi, mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dari literatur yang ada, terlihat bahwa masih terdapat pemisahan antara studi *hedging* yang menekankan aspek politik-keamanan dan kajian FDI yang cenderung berorientasi pada ekonomi semata, sehingga FDI belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen *hedging*. Selain itu, penelitian terdahulu masih melihat ASEAN sebagai satu kesatuan, tanpa menggali mekanisme kebijakan domestik tiap negara, padahal instrumen seperti regulasi penanaman modal, pembatasan kepemilikan asing, atau diplomasi ekonomi bilateral sangat penting dalam praktik *hedging*. Penelitian mengenai *hedging* juga lebih banyak menyoroti negara kecil seperti Vietnam atau Filipina, sementara strategi Indonesia sebagai aktor utama di ASEAN dengan kapasitas ekonomi dan politik yang lebih besar belum mendapat perhatian memadai. Di sisi lain, dinamika baru dalam persaingan AS–Tiongkok pasca-pandemi, termasuk kebijakan tarif dan pergeseran arus investasi, menuntut

adanya kajian yang lebih segar dan relevan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Indonesia mengimplementasikan strategi *hedging* ekonomi dalam merespons kompetisi investasi Amerika Serikat dan Tiongkok di ASEAN. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi kebijakan atau langkah taktis yang ditempuh Indonesia saja, tetapi juga menelaah logika strategis di balik pilihan tersebut apakah didorong oleh kebutuhan menjaga stabilitas politik-ekonomi domestik, diversifikasi sumber investasi, atau upaya meminimalkan ketergantungan pada salah satu kekuatan besar. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana strategi *hedging* tersebut mampu meningkatkan daya tawar Indonesia di tingkat regional, baik dengan memperkuat posisinya dalam struktur ekonomi ASEAN maupun dengan menciptakan ruang manuver yang lebih fleksibel dalam menghadapi tekanan geopolitik global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur efektivitas kebijakan Indonesia, tetapi juga menilai implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan ekonomi-politik di Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menelaah secara mendalam strategi *hedging* ekonomi Indonesia dalam menghadapi rivalitas investasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan ASEAN. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika kebijakan dan

pertimbangan strategis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fokus kajian ditetapkan pada periode 2020–2023, karena periode tersebut menandai fase intensifikasi rivalitas AS–Tiongkok pasca-pandemi serta transisi kebijakan investasi Indonesia menuju hilirisasi sumber daya alam, sehingga konteksnya relevan untuk mengamati praktik *hedging* secara empiris.

Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan menggabungkan sumber-sumber sekunder kredibel dari lembaga nasional dan internasional, seperti BKPM, Kementerian Luar Negeri, ASEAN Secretariat, UNCTAD, dan World Bank. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang bersifat konseptual dan analitis, di mana analisis kebijakan, data FDI, dan narasi diplomatik lebih mudah diakses melalui dokumen resmi dan publikasi akademik dibandingkan data lapangan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai data sekunder dari sumber berbeda untuk meningkatkan validitas temuan. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan data primer, triangulasi sumber sekunder dilakukan untuk menjamin kredibilitas, mengurangi bias interpretasi, dan memastikan konsistensi informasi. Namun, metode ini tetap memiliki keterbatasan karena tingkat kedalaman analisis sangat bergantung pada transparansi, ketersediaan, dan akurasi data dari masing-masing lembaga.

Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis komparatif dan analisis isi untuk menelaah strategi *hedging* ekonomi Indonesia di tengah kompetisi investasi Amerika Serikat dan Tiongkok di ASEAN pada periode 2020–2023. Analisis komparatif

dilakukan dengan membandingkan arus dan orientasi *Foreign Direct Investment* (FDI) antara Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Singapura menempati posisi terdepan dengan FDI berbasis jasa bernilai tinggi di sektor keuangan dan teknologi, sedangkan Vietnam menunjukkan pertumbuhan pesat di sektor manufaktur ekspor seperti elektronik dan otomotif. Indonesia menampilkan pola FDI yang lebih terdiversifikasi, terutama di sektor sumber daya alam dan hilirisasi mineral strategis, sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi pasca-pandemi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa strategi investasi Indonesia bersifat pragmatis dan adaptif, mencerminkan praktik *hedging* ekonomi yang menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat melalui kerja sama energi dan digitalisasi, serta dengan Tiongkok melalui proyek infrastruktur *Belt and Road Initiative* (BRI). Dengan demikian, analisis komparatif tidak hanya menggambarkan perbedaan

performa FDI antarnegara, tetapi juga menyingkap arah kebijakan dan posisi strategis Indonesia dalam rivalitas ekonomi kawasan. Proses analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan hasil dijaga melalui triangulasi sumber agar interpretasi yang dihasilkan tetap kredibel dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Kompetisi dan Posisi Indonesia di ASEAN

Landskap kompetisi investasi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di kawasan ASEAN telah mengalami pergeseran signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari ASEAN Stats Database dan UNCTAD (2024) menunjukkan bahwa Tiongkok secara konsisten meningkatkan porsi investasi langsungnya (FDI) di kawasan, terutama melalui skema *Belt and Road Initiative* (BRI), sementara AS mempertahankan investasinya yang terkonsentrasi pada sektor teknologi tinggi dan manufaktur.



Gambar 1. Grafik Total FDI AS-Tiongkok di ASEAN
Sumber: FDI Markets 2024 dalam FDI Intelligence 2025

Pada Gambar 1, total aliran investasi langsung asing *greenfield* antara ASEAN dan dua ekonomi terbesar tersebut masing-masing mencapai US\$23,8 miliar pada tahun 2024. Namun, dalam tujuh dari 10 tahun sebelumnya (2014-2023), total aliran investasi langsung asing (FDI) *greenfield* Tiongkok dengan ASEAN telah melampaui aliran yang setara

dengan AS (Hunt, 2025). Dominasi Tiongkok ini memberikan momentum yang kuat bagi perluasan investasinya. Namun, investasi AS cenderung memiliki nilai strategis yang tinggi dalam hal transfer teknologi dan standar lingkungan (ESG), yang menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara penerima.

Tabel. 2 Total FDI *Flows* di Setiap Negara ASEAN 2022-2023 (dalam Miliar USD)

NEGARA	2022	2023
SINGAPORE	141,1	159,6
INDONESIA	25,4	21,6
VIET NAM	17,9	18,5
PHILIPPINES	9,5	8,9
MALAYSIA	17,3	8,8
THAILAND	11,1	4,5
CAMBODIA	3,6	4,0
MYANMAR	3,0	2,2
LAO PDR	0,6	1,8
BRUNEI DARUSSALAM	0,3	0,1

Sumber: Dikembangkan dari ASEAN Secretariat (dalam ASEAN Investment Report 2024)

Berdasarkan *ASEAN Investment Report* 2024, posisi Indonesia dalam kompetisi FDI di ASEAN masih belum sekuat Singapura dan Vietnam, meski tetap menempati posisi yang strategis sebagai pasar terbesar di kawasan. Singapura mencatatkan FDI sebesar US\$160 miliar atau 69 persen dari total ASEAN, terutama dari Amerika Serikat dengan nilai US\$73 miliar, menjadikannya hub utama bagi investasi Barat. Vietnam berhasil mencatatkan rekor US\$18,5 miliar,

didorong oleh strategi menarik manufaktur Tiongkok, khususnya di sektor elektronik, kendaraan listrik, dan energi. Sementara itu, Indonesia hanya menerima US\$22 miliar (turun 15 persen dari tahun 2022), dengan US\$1,7 miliar dari Tiongkok yang menurun 50 persen, meskipun tetap mencatat investasi signifikan di sektor manufaktur nikel, baterai, dan kendaraan listrik melalui perusahaan seperti BYD dan CATL.

Di luar angka tersebut, Indonesia juga menjadi tujuan penting investasi strategis, tercermin dari proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Kawasan Industri Kendal, serta investasi digital dari *Google* dan *Microsoft* di pusat data dan energi terbarukan (Fadilah & Jaelani, 2023; Yusuf, 2022). Oleh karena itu, Indonesia belum menjadi “primadona” investasi seperti Singapura atau Vietnam, namun berperan sebagai pasar potensial yang tengah berbenah melalui perbaikan iklim investasi, diversifikasi sumber FDI, dan pengembangan ekosistem EV serta energi hijau untuk memperkuat daya saing regional.

Implementasi Strategi *Hedging* Ekonomi Indonesia

Implementasi strategi *hedging* ekonomi Indonesia dalam menghadapi rivalitas investasi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok menunjukkan bagaimana negara ini mempraktikkan pendekatan yang adaptif dan fleksibel dalam merespons dinamika kekuatan global. Strategi tersebut dapat dipahami secara komprehensif melalui kerangka teori *hedging* yang dikembangkan oleh Kuik Cheng-Chwee (2008), yang menekankan bahwa *hedging* bukanlah bentuk netralitas pasif, melainkan strategi aktif untuk menyeimbangkan dua tujuan utama, yaitu memaksimalkan keuntungan (*return-maximizing measures*) dan mengelola risiko (*risk-contingency measures*). Indonesia menempatkan kepentingan nasional sebagai pusat orientasi kebijakan, dengan mengelola hubungan ekonomi kedua negara besar secara seimbang untuk menghindari

ketergantungan sekaligus memaksimalkan keuntungan dari keterlibatan mereka (Tajudin & Kaswoto, 2023). Pendekatan ini tercermin dari tindakan konkret yang menyatukan upaya menjaga kedaulatan ekonomi dengan peningkatan nilai strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Dari sisi *return-maximizing measures*, Indonesia mengoptimalkan peluang ekonomi melalui diversifikasi mitra dan penguatan kerja sama ekonomi lintas blok. Pemerintah memperdalam hubungan dengan Tiongkok melalui proyek-proyek infrastruktur dan industri dalam skema *Belt and Road Initiative* (BRI) serta *Two Countries, Twin Parks*, yang mendukung integrasi rantai pasok dan pengembangan kawasan industri strategis. Di saat yang sama, hubungan dengan AS diperkuat melalui *Comprehensive Strategic Partnership* yang menekankan kolaborasi di sektor energi bersih, digitalisasi, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan (Kementerian Luar Negeri RI, 2024). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berusaha menarik investasi secara pasif, tetapi juga secara strategis menempatkan diri sebagai pusat pertumbuhan baru di Asia Tenggara yang dapat menampung kepentingan ekonomi kedua kekuatan besar. Sehingga, kebijakan ini berfungsi ganda sebagai sarana mempercepat transformasi ekonomi nasional dan memperluas pengaruh diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan.

Sementara itu, pada aspek *risk-contingency measures*, Indonesia menunjukkan sikap kehati-hatian melalui penerapan kebijakan ekonomi domestik yang terukur untuk mengantisipasi potensi risiko politik dan ekonomi dari ketergantungan terhadap salah satu pihak. Pemerintah memperkuat kerangka regulasi melalui implementasi skema *Public-Private Partnership* (PPP) dan *blended finance* yang memungkinkan pendanaan proyek strategis tidak terikat pada satu sumber modal tunggal (Rofiqoh A., 2024). Langkah ini memastikan fleksibilitas dalam pengelolaan investasi sekaligus memperkecil risiko jika terjadi perubahan arah kebijakan global. Selain itu, revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi instrumen penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi, dengan pembatasan kepemilikan asing di sektor-sektor sensitif serta kewajiban transfer teknologi untuk memperkuat kapasitas domestik (BKPM, 2023). Pendekatan tersebut mencerminkan bagaimana Indonesia menggunakan instrumen ekonomi sebagai alat pertahanan strategis, dengan menyeimbangkan keterbukaan pasar dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Lebih daripada itu, strategi *hedging* ekonomi Indonesia juga diwujudkan melalui peran proaktifnya di tingkat regional. Pada Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia tidak sekadar menanggapi dinamika persaingan AS–Tiongkok, melainkan memanfaatkan posisinya untuk membentuk tatanan ekonomi kawasan yang lebih stabil dan inklusif. Melalui inisiatif seperti *ASEAN Carbon Center of Excellence*

dan *Framework for the Digital Economy Agreement*, Indonesia memimpin arah baru integrasi ekonomi ASEAN yang berfokus pada keberlanjutan, digitalisasi, dan transisi energi hijau (ASEAN Secretariat, 2023). Upaya ini memperlihatkan strategi jangka panjang untuk mengalihkan fokus rivalitas kekuatan besar ke dalam arena kerja sama produktif yang lebih sesuai dengan visi pembangunan nasional. Dengan cara ini, Indonesia bukan hanya menjadi penerima dampak kompetisi global, tetapi juga menjadi aktor yang berperan dalam membentuk pola interaksi ekonomi yang lebih seimbang di kawasan.

Dengan demikian, implementasi *hedging* ekonomi Indonesia mencerminkan kecakapan strategis negara menengah dalam menyeimbangkan keterbukaan ekonomi dengan kemandirian nasional, serta memadukan pragmatisme ekonomi dengan kehati-hatian politik luar negeri. Melalui strategi yang berlapis mencakup penguatan kerjasama ekonomi, pengendalian risiko domestik, dan partisipasi aktif dalam inisiatif regional, Indonesia mampu menjaga stabilitas hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa terjebak dalam ketergantungan struktural terhadap salah satunya.

Kesadaran akan keterbatasan kapasitasnya untuk melakukan *balancing* penuh maupun *bandwagoning* total mendorong Indonesia menempatkan kepentingan nasional sebagai kompas utama dalam pengambilan kebijakan, dengan mengelola keterlibatan dua kekuatan besar tersebut secara seimbang untuk memaksimalkan keuntungan dan

meminimalkan risiko (Zhang, 2023). Pendekatan *hedging* yang adaptif ini tidak hanya memperlihatkan kemampuan Indonesia bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga menegaskan perannya sebagai kekuatan menengah yang mampu memanfaatkan dinamika rivalitas global untuk memperluas ruang manuver ekonomi, memperkuat posisi tawar geopolitik, dan mengukuhkan relevansinya dalam sistem internasional yang semakin kompetitif.

Dampak Strategi Hedging terhadap Posisi Tawar Indonesia

Evaluasi terhadap efektivitas strategi *hedging* Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini telah memberikan dampak signifikan terhadap dua dimensi utama *economic power* yakni *power over others* (kemampuan mempengaruhi pihak lain) dan *power of autonomy* (kemampuan untuk mandiri). Namun, capaian tersebut tidak sepenuhnya seimbang karena di satu sisi, strategi *hedging* berhasil memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia melalui diversifikasi mitra dan sumber investasi, yang mengurangi ketergantungan terhadap satu kekuatan besar. Di sisi lain, keterbatasan dalam proaktivitas, koordinasi kebijakan, dan kecepatan eksekusi masih menjadi hambatan utama bagi Indonesia untuk memaksimalkan kapasitas kepemimpinan ekonominya di kawasan. Dengan kata lain, sementara *hedging* memperluas ruang manuver strategis dan meningkatkan resiliensi, lemahnya daya eksekusi kebijakan serta inefisiensi struktural telah menahan Indonesia dari posisi sebagai

regional agenda setter yang sepenuhnya efektif.

Dalam konteks *power over others*, strategi *hedging* telah memberi Indonesia pengaruh yang cukup berarti di tingkat regional. Kepemimpinan Indonesia dalam mendorong inisiatif ekonomi hijau dan digital di ASEAN, sebagaimana dicatat oleh ASEAN Sekretariat (2023), mencerminkan kemampuannya untuk menyediakan arah dan solusi kebijakan bagi kawasan, bukan sekadar berperan sebagai pasar pasif. Hal ini menandai adanya kemajuan dalam *agenda-setting power*, di mana Indonesia mulai diakui sebagai aktor yang mampu membentuk wacana ekonomi regional. Namun, pengaruh tersebut masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam struktur ekonomi kawasan. Dibandingkan dengan Singapura, misalnya, Indonesia masih tertinggal dalam mengoptimalkan kualitas dan nilai tambah investasi yang masuk. Singapura berhasil memposisikan dirinya sebagai pusat investasi berteknologi tinggi, dengan fokus pada sektor *fintech* dan *research & development*, sementara Indonesia masih berfokus pada sektor berbasis sumber daya alam seperti manufaktur nikel dan proyek infrastruktur. Dengan demikian, meskipun strategi *hedging* memperkuat citra kepemimpinan Indonesia, kemampuan negara ini dalam mengonversi pengaruh politik menjadi pengaruh ekonomi strategis masih terbatas.

Sementara itu, dalam dimensi *power of autonomy*, strategi *hedging* Indonesia menunjukkan hasil yang lebih konsisten dan substansial. Melalui diversifikasi kemitraan ekonomi, Indonesia berhasil membangun

ketahanan terhadap tekanan eksternal dan volatilitas kebijakan global. Ketika kebijakan tarif Amerika Serikat menekan ekspor negara-negara seperti Vietnam dan Kamboja, Indonesia relatif lebih terlindungi karena memiliki lebih banyak mitra strategis dan alternatif pasar. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan *hedging* dalam menciptakan *safety net* ekonomi dan memperkuat kemampuan Indonesia untuk menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa harus tunduk pada satu kekuatan besar. Dengan kata lain, Indonesia telah berhasil mengonversi strategi keseimbangan ini menjadi bentuk otonomi ekonomi yang nyata menjadi suatu capaian yang penting bagi negara *middle power* di tengah rivalitas global antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Namun demikian, peningkatan *power of autonomy* ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan *power over others* yang sepadan. Kelemahan dalam proaktivitas kebijakan, keterbatasan birokrasi, dan inefisiensi implementasi membuat Indonesia sering tertinggal dalam memanfaatkan peluang strategis dibandingkan Singapura dan Vietnam. Singapura unggul dalam kecepatan, prediktabilitas, dan ekosistem kebijakan yang menarik bagi investor berkualitas tinggi, sementara Vietnam berhasil memanfaatkan momentum geopolitik untuk mengamankan proyek-proyek manufaktur padat karya secara agresif. Indonesia, dengan pendekatan yang lebih hati-hati, memang memiliki fleksibilitas lebih besar dan tidak terlalu rentan terhadap tekanan satu pihak, tetapi sifat kehati-hatian ini juga membatasi potensi untuk

melakukan lompatan strategis yang lebih ambisius.

Dengan demikian, strategi *hedging* Indonesia dapat dinilai berhasil dalam menciptakan ketahanan dan ruang kebijakan (*power of autonomy*), namun belum sepenuhnya mampu memaksimalkan kapasitas kepemimpinan ekonomi dan pengaruh terhadap arah investasi (*power over others*). Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan keseimbangan antara kekuatan besar merupakan prestasi penting, tetapi untuk melangkah lebih jauh, negara ini perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, mempercepat implementasi kebijakan investasi strategis, serta memperdalam orientasi pada sektor bernilai tambah tinggi (ASEAN Secretariat, 2023). Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia berpotensi mengubah resiliensi yang dibangun melalui *hedging* menjadi kepemimpinan ekonomi yang lebih substansial dan berpengaruh di kawasan.

SIMPULAN

Dengan demikian, strategi *hedging* ekonomi dapat menjadi model kebijakan adaptif bagi negara menengah lainnya di kawasan dalam menghadapi dinamika rivalitas kekuatan besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi investasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di ASEAN menciptakan lanskap ekonomi yang semakin kompleks. Tiongkok mendominasi dari sisi volume melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI), sementara Amerika Serikat lebih menonjol dalam investasi bernilai strategis di sektor teknologi tinggi dan ESG. Dalam dinamika ini, posisi Indonesia berada

pada level menengah, belum berada pada level kompetitif seperti Singapura maupun Vietnam. Namun, memiliki potensi besar melalui diversifikasi sektor unggulan seperti nikel, kendaraan listrik, infrastruktur digital, dan energi terbarukan.

Implementasi strategi *economic hedging* Indonesia tercermin melalui tiga langkah utama: memperdalam keterlibatan dengan kedua kekuatan besar, memperkuat regulasi domestik untuk mitigasi risiko, dan berperan aktif dalam membentuk agenda ekonomi regional. Strategi ini memperkuat ketahanan ekonomi (*power of autonomy*) dan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memengaruhi arah kebijakan kawasan (*power over others*), meskipun efektivitasnya masih relatif terbatas dibandingkan Singapura dan Vietnam.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa *economic hedging* dapat dijadikan lensa baru dalam kajian Ekonomi Politik Internasional (IPE), memperluas pemahaman tentang strategi negara menengah dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar di ranah ekonomi global. Konsep ini membuktikan bahwa *hedging* tidak hanya relevan pada isu keamanan, tetapi juga krusial untuk menjelaskan respons negara terhadap ketidakpastian ekonomi internasional.

Dari sisi praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan sektor *green economy* dan *digital economy* sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas arus FDI serta memperkuat daya saing Indonesia di tengah kompetisi ekonomi Amerika

Serikat-Tiongkok. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan Vietnam guna menilai variasi efektivitas strategi *hedging* di antara negara-negara menengah di Kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaul Rofiqoh. (2024, August 1). *Implementasi Blended Finance di Sektor Transportasi*. KPBU Kementerian Keuangan.
- Ariandana, M. D., & Abrar, M. I. (2017). *Hedging Sebagai Strategi Indonesia untuk Menghadapi Klaim Cina di Laut Cina Selatan (Indonesia Foreign Policy Review Vol 4)*.
- Arief, T. M. (2025, September 19). Investasi China di ASEAN Bergeser ke Teknologi dan Energi Hijau. *Kompas.Com*.
- ASEAN Secretariat. (2023). *Chairman's Statement of the 43rd ASEAN Summit*.
- ASEAN Stats Database. (n.d.). *Foreign direct investment statistics*.
- Baldwin, D. A. ., & Kapstein, E. B. . (2020). *Economic statecraft*. Princeton University Press.
- Beeson, M. (2018). Geoeconomics with Chinese characteristics: the BRI and China's evolving grand strategy. *Economic and Political Studies*, 6(3), 240–256. <https://doi.org/10.1080/20954816.2018.1498988>
- BKPM. (2023). *Buku Statistik Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2022*.
- Cheng-Chwee, K. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary*

- Southeast Asia*, 30(2), CS30-2A.
<https://doi.org/10.1355/CS30-2A>
- Fadilah, R. F., & Abdul Qodir Jaelani. (2023). Development of Jakarta-Bandung Fast Rail Infrastructure. *Social Impact Journal*, 2(2), 27–37.
<https://doi.org/10.61391/sij.v2i2.65>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 90–100.
<https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hunt, A. I. (2025, April 23). *China touts stability in Asean amid US trade turmoil*. FDI Intelligence.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2024). *Joint Statement Between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia on Advancing the Comprehensive Strategic Partnership and the China-Indonesia Community with a Shared Future*.
- Kuik, C.-C. (2016). How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior towards China. *Journal of Contemporary China*, 25(100), 500–514.
<https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1132714>
- Mead, W. R. (2014). The Return of Geopolitics: The Revenge of the Revisionist Powers. *Foreign Affairs*, 93(3), 69–79.
- Muhammad, F. Y. (2022, September 10). *Kereta Cepat Jakarta Bandung, Upaya Meningkatkan Kinerja Transportasi Massal di Indonesia*. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Nedić, P. (2022). Hedging Strategy as a Response to the United States-China Rivalry: The Case of Southeast Asia. *The Review of International Affairs*, 73(1185), 91–112.
https://doi.org/10.18485/iipe_ria.2022.73.1185.5
- Oatley, T. (2022). *International Political Economy*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003276524>
- Rajesh, G. K., & Deshpande, M. (2025). Hedging with the Indo-Pacific: why Southeast Asia might benefit from embracing the construct. *The Round Table*, 114(4), 463–475.
<https://doi.org/10.1080/00358533.2025.2511000>
- Sonny, S. (2020). Indonesia di Tengah Himpitan Perang Dagang Amerika Serikat dan China. *Jurnal Renaissance*, 5(1), 617.
<https://doi.org/10.53878/jr.v5i1.114>
- Sugiharto Sugiharto, Mulhady Putra, As-Syifa R.Ramdhani Tanjung, & Siti Hajar Sahari. (2025). Posisi Geopolitik Indonesia dalam Konteks Hubungan Regional Asia Tenggara. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 181–191.
<https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.885>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.

<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>

Tajudin, M. F. A., & Kaswoto, J. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Republik Indonesia terhadap Persatuan Emirat Arab tahun 2020-2022. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1145–1154.

<https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.596>

World Investment Report 2024. (2024). *Investment facilitation and digital government*.

Ye, M. (2020). *The Belt Road and Beyond*. Cambridge University Press.

<https://doi.org/10.1017/9781108855389>

Zhang, Y. (2023). Mechanism of Balancing Diplomacy among Middle Powers the Hedging Strategy of Indonesia under the Competition of “Free-Open Indo Pacific” and “Belt and Road Initiative.” *Academic Journal of Management and Social Sciences*, 5(1), 189–193.

<https://doi.org/10.54097/ajmss.v5i1.14077>